

# Peran Uni Eropa Dalam Pencabutan Embargo Ekonomi Myanmar Tahun 2013

Innabah<sup>1</sup>

Bambang Pujiono<sup>2</sup>

## **Abstract**

*This study discusses the role of the European Union in lifting the Myanmar economic embargo in 2013. This study uses a qualitative approach and descriptive analysis method. Researchers explained about the History of Myanmar starting to be embargoed and human rights cases that occurred in the country and the role of the European Union in lifting the economic embargo in the country. Cases of human rights violations that have occurred against civilians in Myanmar carried out by the Myanmar military itself have been going on for a long time since the country was couped until now, it continues unresolved. The case of human rights violations that occurred in Myanmar has become an international issue because this country has also been embargoed in the economy to its weapons until now. In 2013 the country of Myanmar began to democratize carried out by Thein Sein who served as president, the policies carried out by the president at that time became Myanmar's first step in the changes that received support and appreciation from many parties, both the state and international organizations. After the realization of democratization in Myanmar and changes to address human rights violations in the country carried out by the military, the European Union has a role in Myanmar's democratization and the form in this role is a policy taken by the European Union in development in Myanmar.*

**Keywords:** *European Union policy, Myanmar embargo, revocation of Myanmar embargo*

## **Pendahuluan**

Myanmar merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang telah di perintah oleh militer selama bertahun-tahun lamanya sejak kudeta di tahun 1962, selama Myanmar di pimpin dan dikuasi oleh militer ini banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut hingga hampir 50 tahun lamanya. ([https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf), 2011). Setelah kemerdekaan Myanmar dari penjajah, kemudian mulai di pimpin oleh pemerintahan sipil di tahun 1948-1958 dan kemudian di tahun 1960-1962, kemudian sisa dekade yang lain di kuasi oleh junta militer.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, [nenginna17@gmail.com](mailto:nenginna17@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

(<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132306803/penelitian/burma-istoria.pdf>, 2013). Di bawah kekuasaan militer ini mulai terjadi tindak kekerasan pada warga negaranya dan melanggar hak asasi manusia. Kondisi Myanmar cenderung semakin memburuk, terlihat dengan semakin tingginya angka kemiskinan dan bertambahnya jumlah kemiskinan di negara tersebut. Kemudian tidak hanya sering melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia namun juga para pejabat militer melakukan korupsi yang menjadikan permasalahan dalam perekonomian di negara tersebut semakin memburuk, permasalahan etnis di negaranya yang menjadikan pertumpahan darah dan kurangnya keamanan bagi warga sipil di negara tersebut.

Kemudian dengan di tambah embargo yang diberikan kepada Myanmar ini menjadikan permasalahan internalnya semakin memburuk dari berbagai masalah seperti deskriminasi etnis di negaranya, kemiskinan yang terus meningkat dan pengangguran yang semakin tinggi jumlahnya. Negara ini juga menjadi salah satu negara yang di embargo oleh Uni Eropa, PBB dan Amerika Serikat. (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5378/4303>, 2013). Dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah semakin memburuk ini beberapa aktor dunia memberikan sanksi pada Myanmar. Myanmar sendiri di embargo pertama kali pada tahun 1990 dan di tegaskan oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 28 Oktober 1996. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434705358332&uri=CELEX:31996E0635>, 1996). Embargo yang diberikan kepada Myanmar ini di latarbelakangi oleh tidak adanya kemajuan menuju demokratisasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di Myanmar pada saat itu. Dan permasalahan internal yang terus berlanjut, ini yang menjadi alasan Uni Eropa terus memberikan embargo atau sanksi ke negara Myanmar.

Uni Eropa sendiri memberikan embargo pada Myanmar juga karena alasan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin buruk di negara tersebut, alasannya karena Uni Eropa sangat mengedepankan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, terbukti dengan cara serius membantu mengupayakan terwujudnya proses penegakan hak asasi manusia di belahan dunia manapun secara tegas. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi kawasan yang sangat berpengaruh di dunia yang ada di Eropa. Organisasi ini pula diakui banyak pengamat internasional sebagai satu-satunya perhimpunan bangsa atau negara kawasan yang sangat berhasil mengintegrasikan anggotanya dalam satu kebijakan bersama. Bahkan tidak ada satupun keputusannya yang tidak di cermati oleh negara lainnya karena keputusannya yang akan berdampak internasional lantaran kebijakan tersebut merupakan suara bersama yang harus di taati oleh seluruh negara anggota organisasi tersebut. Kebijakan Uni Eropa sangat terlihat dalam pengaruhnya di bidang ekonomi, meskipun di beberapa kasus, keputusan Uni Eropa masih ada yang memberikan pengecualian untuk tidak di taati karena kondisi tertentu yang di alami oleh negara-negara anggotanya salah satunya keputusan tentang penggunaan mata uang tunggal eropa yang hingga kini masih di tolak oleh beberapa negara kawasan Eropa yaitu negara Denmark dan Swedia. (<http://www.antaraneews.com/berita/33181/menapak-tonggak-sejarah-pembentukan-uni-eropa>, 2006).

Namun tidak menjadi alasan organisasi kawasan ini termasuk organisasi yang kuat termasuk dalam perekonomiannya. Kemudian Uni Eropa sendiri merupakan organisasi kawasan yang memiliki pasar tunggal terbesar di dunia dan sangat di segani bahkan berpengaruh di bidang ekonomi. Kemudian di tinjau dari sejarah perekonomiannya Uni Eropa mempunyai fondasi ekonomi yang kuat di bidang industri dan manufaktur. Tujuan adanya embargo yang di berikan Uni Eropa kepada Myanmar agar negara ini bisa mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negaranya yang sudah sangat memburuk dan memprihatinkan, sebenarnya embargo di tujukan untuk mengendalikan dan mempengaruhi Myanmar agar negara tersebut dapat merubah atau mereformasi sistem pemerintahannya. Karena negara tersebut masih dipimpin oleh militer dan sering melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia ketika itu. Namun setelah permasalahan yang terjadi di Myanmar akhirnya negara ini menyadari dan memulai perubahan dalam sistem pemerintahannya terlihat saat Myanmar sudah di pimpin oleh Thein Sein yang menjabat sebagai presiden pada Maret 2011 lalu, dengan adanya perubahan ini mulailah secara bertahap negara ini memulai reformasi dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia. Kemudian dengan adanya perubahan di negara ini pula maka banyak apresiasi yang diberikan dari dunia internasional salah satunya dari organisasi kawasan seperti Uni Eropa. Myanmar perlu mengambil langkah-langkah menuju demokrasi seperti memperkuat penegakkan hukum, melanjutkan perubahan konstitusi agar Myanmar benar-benar di pimpin oleh politisi sipil, meredakan konflik di antara suku atau etnis yang ada, mengahiri deskriminasi dan juga memberikan keamanan pada warga negaranya sendiri.

Dalam proses demokratisasi di Myanmar ini Uni Eropa sendiri memiliki peran di dalamnya, peran ini sebagai bentuk apresiasi karena Myanmar memulai untuk merubah sistem pemerintahannya yang sebelumnya dikuasi oleh militer dan di bawah kepemimpinan yang agresif atau otoriter. Termasuk reformasi yang di lakukan Myanmar seperti membuat komhas hak asasi manusia yang juga menjadi alasan Uni Eropa melakukan keterlibatannya pada Myanmar karena Uni Eropa sendiri menjunjung tinggi tentang nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Kemudian setelah Myanmar memulai reformasi pemerintahannya akhirnya Uni Eropa melakukan kebijakan dalam mencabut embargo Myanmar, ini adalah salah satu bentuk peran Uni Eropa dalam apresiasi terhadap demokratisasi Myanmar. Dan dalam kebijakan Uni Eropa sendiri melakukan pencabutan embargo ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak positif pada Myanmar dalam perekonomian di negara tersebut. Tujuan dalam mencabut embargo ekonomi Myanmar, agar negara ini dapat melanjutkan demokratisasinya dan terus melakukan perubahan termasuk dalam menangani permasalahan internal yang semakin memprihatinkan tiap waktunya.

Kebijakan dalam pencabutan embargo atau sanksi Myanmar hanya dalam embargo ekonomi, sedangkan dalam embargo militer dan persenjataan tidak di cabut karena para militer Myanmar sendiri masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam penindasan kepada warga sipil di negaranya sendiri, khususnya, praktik penyiksaan, eksekusi sewenang-wenang, kerja paksa, pelecehan perempuan, penangkapan politik, pemindahan paksa penduduk dan pembatasan hak-hak dasar kebebasan berbicara, bergerak dan berkumpul.

### **Pembahasan**

Komitmen PBB ini merupakan upaya untuk menciptakan kesepakatan internasional di bidang hak asasi manusia yang merupakan bagian internal dari hubungan internasional. Salah satu instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang mengikat seperti UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dengan deklarasi universal HAM ini sebagai salah satu yang disepakati dan diterima oleh dunia internasional, dan sebagai bentuk tujuan HAM dalam merancang bentuk umum dan merupakan sumber utama terbentuknya dua instrumen yaitu konvenan internasional tentang hak sipil dan politik konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan telah adanya perjanjian dunia mengenai hak asasi manusia maka seluruh negara harus melaksanakan di setiap pemerintahan di negaranya. Adanya perjanjian khusus tentang hak asasi manusia untuk melindungi seluruh umat dalam hak-haknya dalam menjalani hidup.

Namun kenyataannya berbeda dengan yang dihadapi warga negara di Myanmar yang hak-hak dasarnya telah hilang karena pemerintahan yang otoriter dan membatasi kehidupan terhadap warganya. Banyak hak-hak asasi manusia yang telah hilang di Myanmar seperti hak bersosial, berpendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak karena tindakan para militer negara tersebut yang terus melakukan tindakan kekerasan setiap saatnya, bahkan deskriminasi etnis yang terjadi di negara tersebut hingga saat ini. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan ini dimulai saat pemerintahan kudeta dan dipimpin oleh militer yang banyak melakukan penindasan yang terjadi, kemudian tidak ada hak politik bagi warga sipil di negara tersebut hingga terjadinya protes massa pada tahun 1988 yang menimbulkan banyak korban meninggal dari berbagai kalangan baik itu muda dan tua tidak ada perbedaannya seluruh warga sipil merasakan menindasan dan kekerasan dari militer. (<https://www.britannica.com/place/Myanmar/Myanmar-since-1988>, 2017).

Hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar lainnya seperti tidak ada hak dalam berpolitik bagi warga sipil, kemudian deskriminasi etnis seperti tragedi Rohingya yang terjadi pada tahun 2012 yang memaksa keluar dari desa dengan kekerasan komunal yang membakar desa-desa di Rakhine, kemudian dibatasinya gerakan dan akses mereka terhadap pekerjaan. Kemudian diskriminasi etnis dan agama seperti pada muslim Myanmar dan kelompok buddha di Myanmar yang melakukan kekerasan antara kedua kelompok tersebut mengakibatkan kota Meiktila di Myanmar dalam keadaan hancur dengan rumah-rumah dan gedung yang telah rata dihancurkan oleh massa pada saat itu. ([https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130404\\_burmamuslim](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130404_burmamuslim), 2013). Dan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya masih terus berlangsung tanpa melihat tua ataupun muda dan dari kalangan apapun dari negara Myanmar masih terus berlangsung. Dengan berbagai aspek kehidupan yang dibatasi oleh pemerintahannya ini menjelaskan jika di negara Myanmar telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang

berbentuk membatasi segala aspek kehidupan hingga melakukan tindakan kekerasan tanpa segan dari berbagai kalangan manapun.

Permasalahan internal yang dialami oleh negara Myanmar sendiri juga seperti banyaknya korupsi dalam berbagai sektor yang dilakukan oleh para pemimpin militer dengan para pembisnis dengan tujuan untuk memperkaya diri dengan melakukan berbagai kesepakatan. Kemudian transparansi internasional menyebut Myanmar sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Dalam daftar peringkat korupsi dunia, Myanmar menempati urutan 172 dari 176 negara. (<https://internasional.kompas.com/read/2013/01/09/21165398/Myanmar.Resmikan.Tim.Pemberantas.Korupsi>, 2019). Isu-isu yang terjadi di Myanmar sendiri seperti isu demokrasi, isu keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia, sampai pada isu kemanusiaan. Masalah keamanan dan pemerintahan Junta militer yang telah ada sejak tahun 1980an melatarbelakangi dikeluarkannya beberapa kebijakan embargo, baik itu embargo militer sampai embargo ekonomi Myanmar. Embargo-embargo ini juga yang menjadi salah satu alasan terpuruknya pertumbuhan ekonomi di negara ini. (<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf>, 2019).

Dengan permasalahan yang terjadi di Myanmar ini menjadi awal negara ini diembargo oleh berbagai pihak dunia internasional karena sikap pemerintahannya yang memberlakukan warga sipil dengan melakukan pembatasan hak-hak dalam berbagai bentuk dan kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil di negaranya, menjadikan negara tersebut diembargo salah satunya Uni Eropa suatu organisasi kawasan yang memberikan sanksi terhadap Myanmar dalam bentuk sanksi ekonomi dan persenjataan. Sanksi atau embargo Uni Eropa yang diberikan pertama kali kepada Myanmar sendiri sudah ada sejak tahun 1990 dan ditegaskan pada "POSISI UMUM tanggal 28 Oktober 1996 ditetapkan oleh Dewan Uni Eropa berdasarkan Pasal J.2 dari Perjanjian Uni Eropa, tentang Burma / Myanmar (96/635 / CFSP)". (<https://www.europeansanctions.com/region/burma/>, 2019). Embargo Uni Eropa yang diberikan kepada Myanmar ini berupa embargo ekonomi dan embargo persenjataan. Embargo atau sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar ini dijelaskan pada traktat yang tertulis di kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri Uni Eropa atau *Common Foreign and Security Policy* (Posisi Bersama 2010/232 /CFSP), sanksi Uni Eropa ini terdiri dari: sebagian besar anggota junta militer dan rekan-rekan mereka, termasuk larangan visa dan pembekuan aset untuk anggota junta dan perwira tinggi militer, otoritas di sektor pariwisata, dan anggota keluarga. Langkah ini, dimaksudkan untuk mempengaruhi individu yang ditargetkan dalam kapasitas pribadi mereka, dilengkapi dengan sanksi diplomatik tradisional, yaitu, penangguhan kunjungan pemerintah bilateral tingkat tinggi.

Sejumlah tindakan diarahkan pada pendirian militer, Embargo senjata dan perlengkapan militer. Larangan keterikatan personel militer pada perwakilan diplomatik Myanmar di negara-negara anggota UE, juga pada keterikatan personel militer terhadap perwakilan diplomatik negara-negara anggota di Myanmar. Penangguhan bantuan non-kemanusiaan (dengan beberapa pengecualian diizinkan untuk proyek-proyek dalam mendukung hak asasi manusia, demokrasi, pemerintahan yang baik, pencegahan konflik, pembangunan kapasitas untuk masyarakat sipil, kesehatan dan pendidikan, kemiskinan pengentasan, dan perlindungan lingkungan). Larangan investasi dan pinjaman, termasuk perpanjangan partisipasi dalam perusahaan milik negara, dan larangan penciptaan usaha patungan. Larangan ekspor peralatan dan teknologi, dan penyediaan bantuan teknis atau keuangan untuk perusahaan yang terlibat dalam pembalakan dan pengolahan kayu dan penambangan logam dan batu berharga dan semi berharga. Larangan impor kayu bulat,

produk kayu, logam, dan batu berharga dan semimulia. (<https://www.giga.hamburg.de/de/en/publication/myanmar-the-beginning-of-reforms-and-the-end-of-sanctions>, 2013). Hingga situasi perekonomian di Myanmar pada saat itu semakin memburuk karena penyebab adanya manajemen yang salah di negaranya. Terjadinya inflasi yang besar, krisis perbankan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta tingginya angka kemiskinan di Myanmar karena ketidakmampuan pemerintahannya dalam menangani dan mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintahan Myanmar sendiri baru dimulai lagi dipimpin oleh politisi sipil pada tahun 2011 yang memulainya reformasi bersejarah, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Thein Sein saat itu dan secara bertahap mulai melangkah menuju tahap-tahap reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan dan hak asasi manusia. Perubahan politik di Myanmar menjadi negara yang demokrasi ini mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Tanda-tanda positif ini terlihat saat Jendral (Purn) Thein Sein yang menjadi presiden saat itu memulai adanya perubahan dan mulai merintis Myanmar menuju perubahan, dan perubahan ini seperti, memulai dengan membuka diri Myanmar ke luar negeri, kemudian melonggarkan kemerdekaan pers, melepas sebagian tahanan politisi-politisi, membentuk Komhas HAM, menghapus status tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi dan juga mengizinkan wawancara dengan media barat, dan terakhir mengizinkan NLD untuk mengikuti daftar parpol dan juga mengikuti pemilu. (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar.html>, 2012).

Dengan memulai perubahan langkah demi langkah menuju negara yang demokratis Myanmar juga sudah memulai untuk membuka diri dengan dunia internasional yang di apresiasi oleh dunia internasional pula dan dukungan dari berbagai negara. Tidak hanya di buatnya komite aksi melawan korupsi, Myanmar juga memulai perubahan dalam berbagai hal salah satunya pembebasan para tahanan politik semakin memantapkan langkah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi.

Alasan Myanmar merubah sistem pemerintahannya atau melakukan demokratisasi, Myanmar mengharapkan hasil dari perubahan tersebut mulai dihentikannya sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang selama ini menjadi hambatan bagi Myanmar untuk melakukan kontak dengan masyarakat internasional terutama di negara-negara barat. Uni Eropa merupakan organisasi kawasan yang memiliki struktur-struktur organisasi yang lengkap dibanding organisasi lainnya kemudian organisasi kawasan ini juga sangat mengedepankan HAM, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM Uni Eropa membuat perjanjian hak asasi manusia yang ditandatangani oleh 47 negara yang juga anggota dewan Eropa, yang disebut dengan konvensi Eropa tentang HAM (ECHR). Pemerintah yang menandatangani ECHR telah membuat komitmen hukum dalam mematuhi standar perilaku tertentu dan agar melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang biasa. Ini adalah perjanjian untuk melindungi supremasi hukum dan mempromosikan demokrasi di negara-negara Eropa. (<https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-convention-on-human-rights>, 2018).

European Convention of Human Right secara resmi dirancang oleh Dewan Eropa selama musim panas di Strasbourg pada tahun 1949. Dan lebih dari 100 anggota parlemen dari berbagai negara Eropa berkumpul dalam menyusun piagam tersebut. Dan dalam pidatonya di depan Kongres pertemuan tersebut, Winston Churchill mengatakan: "*In the centre of our movement stands the idea of a Charter of Human Rights, guarded by freedom and sustained by law*" Dalam pidatonya menyatakan jika Piagam Hak Asasi Manusia akan dijaga oleh kebebasan dan didukung oleh hukum, kemudian konvensi Eropa tentang hak asasi manusia ini berlaku sejak 3 September 1953. (<https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-convention-on-human-rights>, 2018). Tujuan dengan adanya konvensi ini agar dapat melindungi hak-hak manusia yang tidak hanya orang-orang biasa yang dilindungi dari pelecehan oleh negara namun tugas yang harus ditempatkan pada negara-negara tersebut untuk melindungi individu. Dengan adanya konvensi tentang hak asasi manusia ini juga agar meningkatkan standar dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia di seluruh anggota negara. Kemudian di Eropa sendiri terdapat dua sistem hak asasi manusia yaitu, pertama dalam kerangka Dewan Eropa dan kedua yaitu dalam kerangka Uni Eropa, dalam keduanya merupakan entitas yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling menunjang. (<http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/190/97>, 2000).

Peran Uni Eropa dalam pencabutan embargo ekonomi ini terlihat dalam bentuk kerjasama pembangunan di Myanmar dimulai dengan membangun kemitraan yang kuat dan komitmen dengan Myanmar dengan tujuan untuk mendorong reformasi di Myanmar. Kerjasama ini juga untuk memulai perdagangan internasional antara Myanmar dan Uni Eropa, namun tujuan lainnya juga agar militer-militer Myanmar menghentikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Kemudian peran lainnya dalam bentuk kerjasama dalam pertahanan dengan negara Myanmar ini alasannya agar dapat membantu dan melindungi warga sipil di Myanmar termasuk di daerah-daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau yang juga hak asasi manusianya masih sulit di dapatkan karena masih dijaga oleh militer-militer Myanmar. Lalu setelah adanya reformasi di negara Myanmar yang dimulai sejak tahun 2011, oleh presiden Thein Sein dengan mencabut kendali militer dan mereformasi negara menjadi negara yang demokrasi. (<https://m.cnnindonesia.com/internasional/2014111017555-109-10648/perjalanan-myanmar-menujudemokrasi>, 2014). Dalam reformasi Myanmar ini pada 2013, Uni Eropa menegaskan kembali keterlibatannya dengan Myanmar melalui Perjanjian Kerangka Kerja Komprehensif. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi memberikan dukungan bagi pemerintah untuk menyelesaikan reformasi politik dalam hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. ([http://www.eias.org/wp-content/uploads/2016/02/EU-Asia-at-a-glance-Megyeri\\_Andras-EUMyanmar-Development.pdf](http://www.eias.org/wp-content/uploads/2016/02/EU-Asia-at-a-glance-Megyeri_Andras-EUMyanmar-Development.pdf), 2016). Yang sebelumnya sudah ditangguhkan sanksi Myanmar ini pada tahun sebelumnya yaitu 2012. Kebijakan Uni Eropa dalam mencabut embargo ekonomi Myanmar tahun 2013 yaitu:

1. larangan visa dan pembekuan aset untuk anggota junta dan perwira tinggi militer, otoritas di sektor pariwisata, dan anggota keluarga.
2. bantuan non-kemanusiaan

3. Larangan investasi dan pinjaman, termasuk perpanjangan partisipasi dalam perusahaan milik negara, dan larangan penciptaan usaha patungan.
4. Larangan ekspor peralatan dan teknologi - dan penyediaan bantuan teknis atau keuangan - untuk perusahaan yang terlibat dalam pembalakan dan pengolahan kayu, penambangan logam dan batu berharga dan semi berharga. (<https://www.giga.hamburg.de/de/en/publication/myanmar-the-beginning-of-reforms-and-the-end-of-sanctions>, 2013).

Pencabutan embargo ekonomi ini telah dilakukan Uni Eropa pada tahun 2013 lalu, dengan pengecualian di embargo militer dan persenjataan, Sejumlah tindakan diarahkan pada pendirian militer ini. (<https://www.giga.hamburg.de/de/en/publication/myanmar-the-beginning-of-reforms-and-the-end-of-sanctions>, 2013). Embargo yang dilakukan oleh Uni Eropa bertujuan agar Myanmar bisa melakukan reformasi politik dalam pemerintahannya dikarenakan yang dilakukan oleh negara ini, seperti penindasan kepada warga negaranya yang dilakukan oleh militer negaranya hingga banyak korban yang meninggal, ketidakmampuan pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan internal seperti mengatasi kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, perekonomian yang semakin menurun, deskriminasi etnis di negara tersebut, dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat militer yang memberikan dampak buruk pada perekonomian negaranya yang semakin memprihatinkan.

Tujuan dan harapan negara Myanmar dalam proses dan perubahannya dalam demokratisasi adalah agar dihentikannya embargo atau sanksi dari berbagai negara atau organisasi internasional termasuk dari Uni Eropa sendiri agar tidak ada hambatan bagi negara Myanmar dalam melakukan kontak kerjasama dengan dunia internasional terutama negara-negara barat salah satunya negara-negara di Uni Eropa. Tujuan Uni Eropa dalam pencabutan embargo ini agar negara Myanmar terus melakukan perubahan dan demokratisasi di negaranya, menyelesaikan permasalahan internalnya yang semakin memburuk, dan menangani pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan lainnya adalah adanya kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dan negara Myanmar dan menjadikan negara ini menjadi lebih baik lagi kedepannya hingga mengurangi dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.

### **Kesimpulan**

Myanmar negara yang terletak di Asia Tenggara ini merupakan negara yang sebelumnya dipimpin oleh junta militer dengan sistem pemerintahan yang otoriter, namun pemerintahan ini sering mendapat kecaman dari berbagai negara atau dunia internasional karena negara ini telah melakukan banyak pelanggaran. Pelanggaran ini berupa hak asasi manusia dan penindasan seperti kekerasan pada masyarakat di negara tersebut. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, kendali pemerintah junta militer terlihat dalam pengambilan keputusan ekonomi tanpa memperhatikan nasib rakyat Myanmar. Yang menjadikan rakyat Myanmar semakin menderita atas kebijakan yang dilakukan oleh junta militer tersebut. Kemudian bukan hanya dalam kebijakan dan perlakuan militer terhadap rakyat sipil yang keji tetapi ditambah dengan pejabat-pejabat militer yang juga terus melakukan korupsi yang menjadikan perekonomian di negara tersebut semakin buruk. Pengendalian penuh oleh militer dalam segala aspek kehidupan yang banyak merugikan masyarakat Myanmar, kemudian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah junta



militer dan penangkapan tokoh-tokoh pro demokrasi akibat pemilu tahun 1990 menimbulkan kemarahan dunia internasional. Inilah yang menjadikan Myanmar mendapatkan banyak kecaman keras dari dunia internasional bahkan juga mendapatkan sanksi-sanksi dari Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa dan Asia.

Awal mula Myanmar di embargo pertama kali sejak tahun 1990 yang di tegaskan oleh Dewan Uni Eropa pada 28 Oktober 1996, alasan Myanmar di embargo sudah sangat lama karena tidak adanya perubahan demokratisasi di Myanmar kemudian pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi yang menjadikan negara tersebut semakin memprihatinkan dalam segala aspek, baik dalam ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, tingkat kemiskinan, dan keamanan yang sangat kurang untuk warga sipil di negara tersebut.

Uni Eropa merupakan salah satu organisasi kawasan yang juga memberikan sanksi pada Myanmar, sanksi yang diberikan berupa embargo larangan investasi ke Myanmar, ekspor senjata, pembatasan visa ke Myanmar, pembekuan aset para pejabat militer, dan termasuk ekspor batu mulia, kayu dan logam. Myanmar sendiri menjadi salah satu negara yang semakin miskin dan sulit dalam bidang perekonomiannya. Dengan embargo ekonomi di Myanmar ini semakin menjadikan negara tersebut tidak mampu mengelola perekonomiannya dengan baik karena terbatasnya kerjasama ekspor impor dan kerjasama ekonomi lainnya dengan negara-negara di Uni Eropa. Namun setelah Myanmar melakukan perubahan sistem pemerintahannya menjadi demokrasi dan mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari berbagai negara termasuk Uni Eropa sendiri yang kemudian mulainya pencabutan embargo karena negara Myanmar mulai menuju perubahan demokrasi yang nyata dimulai dengan adanya pemilu yang kemudian dari pemilu tersebut menjadikan awal mula perubahan yang lebih baik lagi dalam pemerintahannya pula melakukan tindakan seperti dibebaskannya sebagian para politisi-politisi pro-demokrasi, mulai terbuka diri dengan luar negeri, menegakkan hukum, kemudian melonggarkan kemerdekaan pers, membentuk Komhas HAM, dan mengizinkan LND (partai Liga Nasional untuk Demokrasi) untuk mengikuti parpol dan mengikuti pemilu di Myanmar ketika itu.

Dengan adanya banyak perubahan ini Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk mencabut seluruh embargo kecuali embargo persenjataan yang masih tetap di berlakukan kepada Myanmar karena masih adanya penindasan militer pada warga sipil di negara tersebut. Meski di bidang persenjataan masih tetap di embargo namun Myanmar masih bisa melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di Uni Eropa, kemudian para investor dari negara-negara di Uni Eropa yang ingin berinvestasi di negara Myanmar bisa berlanjut. Uni Eropa sendiri merupakan organisasi kawasan yang terbesar dan memiliki lembaga-lembaga yang sangat lengkap dibanding dengan organisasi internasional yang lain. Kemudian dalam perekonomiannya Uni Eropa memiliki pasar tunggal dengan 28 negara, sehingga Uni Eropa memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia. Dengan pengaruh ekonomi yang besar inilah Uni Eropa mampu memberikan sanksi atau embargonya kepada Myanmar.

Embargo sebenarnya ditujukan untuk mengendalikan dan mempengaruhi Myanmar agar negara tersebut dapat merubah sistem pemerintahan di negaranya. Di sini terlihat bahwa Uni Eropa berperan dalam perubahan di Myanmar melalui tindakan Uni Eropa dengan kebijakan mencabut embargo ekonomi Myanmar, kemudian Uni Eropa mengendalikan dan membatasi ekspor impor dan perdagangan antara negara-negara Uni Eropa dengan Myanmar. Kemudian tujuan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pembangunan Myanmar adalah untuk membantu pembangunan di Myanmar dan terus mendukung Myanmar atas demokratisasinya melalui adanya perdagangan internasional antara Myanmar dan juga Uni Eropa setelah pencabutan embargo ekonomi Myanmar oleh Uni Eropa kemudian menekankan agar militer-militer di Myanmar untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Dengan ekonomi besar atau pasar tunggal yang dimiliki Uni Eropa menjadikan organisasi kawasan ini disegani oleh dunia internasional dan dengan ini pula Uni Eropa menjalin kerjasama dengan Myanmar karena negara tersebut terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Inilah yang menjadikan banyak negara menginginkan untuk bekerjasama dengan negara Myanmar ini. Kemudian peranan Uni Eropa dalam pencabutan embargo ekonomi sendiri di tunjukkan dalam bentuk kebijakan pembangunan di negara Myanmar dan pencabutan embargo ekonomi di tahun 2013. Kemudian dengan menggunakan konsep embargo ekonomi dalam penelitian ini agar dapat menjelaskan tentang embargo ekonomi yang ada di negara Myanmar embargo ekonomi sendiri merupakan pelarangan perdagangan atau ekspor impor, pembatasan perdagangan atau ekspor impor dengan sebuah negara. Dan Myanmar yang ketika itu di embargo ekonominya untuk memengaruhi negara Myanmar agar merubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi dan menghentikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer-militer Myanmar. Dengan embargo ini Uni Eropa mengharapkan perubahan yang lebih baik kedepannya. Kemudian dengan harapan ini Uni Eropa menginginkan perubahan demokratisasi di Myanmar terus berlanjut terutama dalam menangani masalah internal di negara tersebut yang sering melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan permasalahan lainnya di negara tersebut.

## **Referensi**

- Amnesty International UK. (2018). What is the European Convention on Human Rights?". <https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-europeanconventionon-human-rights> diakses pada 23 Juli 2019
- BBC. (2013). "Ada apa di balik serangan terhadap Muslim Burma?". BBC News. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130404\\_bur\\_mamuslim](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130404_bur_mamuslim) diakses pada 22 Juli 2019
- EUR-Lex. (1996). "EU Sanctions: Law, Practice and Guidance". <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1434705358332&uri=CELEX:31996E0635> diakses pada 20 Juli 2019
- European Institute for Asian Studies. (2016). "The Final Frontier The EU's Development Policy in Myanmar". [http://www.eias.org/wpcontent/uploads/2016/02/EU-Asia-at-a-glanceMegyeri\\_Andras-EUMyanmar-Development.pdf](http://www.eias.org/wpcontent/uploads/2016/02/EU-Asia-at-a-glanceMegyeri_Andras-EUMyanmar-Development.pdf) diakses pada 20 Maret 2019
- EU Sanctions. "At a Glance". <https://www.europeansanctions.com/region/burma/> diakses pada 20 Juli 2019
- Encyclopedia Britannica. "Myanmar since 1988". <https://www.britannica.com/place/Myanmar/Myanmar-since-1988> diakses pada 22 Juli 2019

- Evi Fitriani. (2000). "HAM di Eropa". <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/190/97> diakses pada 23 Juli 2019
- Ita Mutiara Dewi. (2013). "Pengalaman militer Burma: Sebuah analisis historispolitik". <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132306803/penelitian/burmaistoria.pdf> diakses pada 24 Juli 2019
- Krisman Khanisa.(2012). "Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar". LIPI: Jakarta. The Center for Political Studies. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-internasional/624-garisawaljalan-demokrasi-myanmar.html> diakses pada 5 Januari 2018
- Kompas. (2013). "Myanmar Resmikan Tim Pemberantasan Korupsi". <https://internasional.kompas.com/read/2013/01/09/21165398/Myanmar.Resmikan.Tim.Pemberantas.Korupsi> diakses pada 8 Mei 2019
- Marco Bunte & Clara Portela. (2012). "Myanmar: The Beginning of Reforms and the End of Sanctions". Giga Fokus. <https://www.gigahamburg.de/en/publication/myanmar-the-beginning-ofreformsand-the-end-of-sanctions> diakses pada 22 Juli 2019
- Myanmar merupakan failed states. (2007). "Hubungan Myanmar dengan aktoraktor lain dalam sistem internasional". <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf> diakses pada 21 Juli 2019
- Laudy Gracivia.(2014). "Perjalanan Myanmar Menuju Demokrasi". CNN Internasional. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/2014111017555-109-10648/perjalanan-myanmar-menuju-demokrasi> diakses pada 24 Juli 2019
- Proses demokratisasi Myanmar. (2011). [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf) diakses pada 4 Januari 2018
- Sugiarto Pramono. (2013). "Efektivitas Embargo Dalam Mendorong Demokratisasi di Myanmar". Semarang: Forum Ilmu Sosial. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5378/43>
- Yuri Alfrin Aladin. (2006). "Menampak Tonggak Sejarah Pembentukan Uni Eropa". Media Antara News. <http://www.antaranews.com/berita/33181/menapak-tonggaksejarah-pembentukan-uni-eropa> diakses pada 26 April 2017